Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2022. Vol. 3, No. 4. Page 210-226
https://doi.org/10.52103/jmch.v3i4.1239
E-ISSN 2774-4590

JOURNAL OF MUSLIM COMMUNITY HEALTH (JMCH)

Penerbit: Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat
Universitas Muslim Indonesia
Journal Homepage:
https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch

Original Article

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beerencana Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program Keluarga Berencana di Kota Makassar

Susilawati[1], *Andi Muhammad Multazam[2], Haeruddin[2]

[1]*Rumah Sakit Umum Wisata*
[2]*Magister Program in Public Health, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia*

Email corresponding author: *andimultazam@umi.ac.id*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana terhadap penguatan keterlibatan masyarakat dalam program KB Kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif murni, yaitu penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB dalam penguatan keterlibatan masyarakat dalam program KB di Kota Makassar. Wawancara, observasi, dan telaah dokumen merupakan metode pengumpulan data. Peneliti mewawancarai kepala dinas, kepala bagian pengendalian, dan kepala subbagian kependudukan dan keluarga berencana di Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Makassar di Provinsi Sulawesi, serta ibu-ibu yang telah mengadopsi KB. Prosedur pengolahan dan analisis data adalah analisis kualitatif yang terdiri dari lima tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perumusan kebijakan menggambarkan bahwa derajat perumusan sudah dilakukan dengan baik setiap tahunnya, (2) Implementasi program, khususnya a. aspek sosialisasi, menurut temuan penelitian yang berkaitan dengan teori strategi, dilihat dari dimensi pelaksanaan sosialisasi, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program KB tampaknya cukup efektif jika diukur dari jumlah peserta yang terlibat dalam KB aktif, b. pengendalian penduduk, dan Sesuai dengan temuan penelitian terdahulu, pemasangan program pengendalian dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB. 3. Evaluasi dan Pengawasan Dalam hal evaluasi dan pemantauan keterlibatan masyarakat dalam program KB, statistik menunjukkan relatif tinggi, dengan rata-rata 68% menggunakan KB dan sisanya 32% tidak menggunakan KB.

***Kata Kunci**: Strategi; Pertunangan Komunitas; Keluarga Berencana;*

ABSTRACT
This study aims to assess and analyze the Department of Population Control and Family Planning's strategy towards strengthening community engagement in the city of Makassar's family planning program.
This study employed a descriptive method with a qualitative approach to the study. This study utilized qualitative research since the research conducted is purely descriptive, i.e., the author wishes to describe and analyze the population control and family planning service's approach for strengthening community engagement in the family planning program in Makassar City. Interview, observation, and document review were methods for collecting data. Researchers interviewed the department head, the head of control, and the head of the sub-division of population planning and family planning at the Makassar City Population Control and Family Planning Office in Sulawesi Province, as well as mothers who had adopted family planning. The procedure for data processing and analysis is a qualitative analysis comprised of five stages: data gathering, data reduction, data display, data verification, and conclusion drawing.
The study's findings revealed that: (1) Policy formulation illustrates that the degree of formulation has already been carried out well every year, (2) Program implementation, particularly a. socializing aspect, according to the

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

findings of research related to strategy theory, as seen from the dimensions of socialization implementation, increasing community engagement in family planning programs seems to be quite effective when measured by the number of participants involved in active family planning, b. population control, and According to the findings of the preceding study, the installation of control programs in improving community participation in family planning programs. 3. Evaluation and supervision In terms of evaluating and monitoring community engagement in the family planning program, statistics indicate that it is relatively high, with an average of 68% using family planning and the remaining 32% did not use family planning.

***Keywords**: Strategy; Community Engagement; Family Planning;*

LATAR BELAKANG

Indonesia merlupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai jumlah populasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km2, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km2. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.

Laju pertumbuhan penduduk (G*rowth Rate*) ditentukan oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tingkat kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*) dan tingkat kematian kasar (*Crude Death Rate*) masing-masing menunjukkan jumlah kelahiran hidup dan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Peningkatan jumlah penduduk yang besar akan menyebabkan kemiskinan di masa depan karena tekanan pada sumber informasi lainnya langka seperti energi, atau akan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global (Nuraeni, Amirulloh, and Meigawati 2021).

Jumlah penduduk di Kota Makassar berdasarkan data penduduk yang bersumber dari proyeksi penduduk hasil sensus penduduk 2010, pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kota Makassar berjumlah 864.021 jiwa, terdiri dari laki-laki 427.325 jiwa dan perempuan 436.696 jiwa. Dari data jumlah penduduk dan luas wilayah akan dapat diketahui kepadatan penduduk suatu wilayah dengan satuan jiwa/km². Luas Kota Makassar adalah 77.378,64 km², sedangkan jumlah penduduknya adalah 864.021 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduknya menjadi 11,166 jiwa/km² (Kota Makassar Dalam Angka,2017:56). Hasil tersebut menunjukkan kenaikan pertumbuhan penduduk yang masihtinggi di Kota Makassar dibandingkan kabupaten lain. Pelaksanaan program keluarga berencana oleh Kota Makassar ternyata kurang efektif dilihat dari angka pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tiga tahun yaitu 2013-2016 yang tinggi sebesar 23,82 ribu jiwa.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang. Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. https://makassarkota.go.id/geografis/, (akses tanggal 21 juni 2020,18.24 Am).

Pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Makassar dijalankan oleh Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Salah satu fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah melaksanakan pengendalian jumlah penduduk melaluipeningkatan program

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

KB. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan KB dan keseharan reproduksi, mendorong Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan program KB dan keluarga sejahtera serta meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga untuk membangun keluarga kecil berkualitas merupakan tugas dari Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Makassar.

Melihat kondisi kenaikan penduduk yang masih tinggi, seharusnya suatu daerah mampu memberi pandangan yang bagus bagi masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat terkait tentang program pembangunandalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk agar suatu daerah tersebut mempunyai pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Partisipasi partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Selain dari faktor masyarakat, yang menimbulkan permasalahan adalah kurangnya kinerja dari pemerintah untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di Kota Makassar. Menurut Winarno (2013:19), Partisipasi masyarakat adalah wahana pengembangan warga negara yangdemokratis yang berfungsi dalam mendorong warga negara untuk berperan serta dengan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam berinteraksi, mempengaruhi proses-proses pemerintahan dan berperan aktif dalam setiap kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah program keluarga berencana.

Terkait dari apa yang menjadi permasalahannya apakah dari teknis pelaksanaan atau implementornya, kurangnya respon dan partisipasi dari masyarakat, ataupun dari pelaksanaan strategi itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan tujuan menganalisis strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat mengikuti Program Keluarga Berencana Di Kota Makassar.

METODE

Jenis, Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu model penelitian nyang berusaha membuat gambaran/paparan secara cermat terhadap fenomena sosial tertyentu tanpa melakukan intervensi dan penyusunan hipotesis. Pendekatan yang dianut pada penelitian ini adalah pendekatan emik dan etik. Dengan pendekatan emik, konsekuensinya peneliti mencatat apa saja yang dilakukan dan diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan program keluarga berencana. Dengan pendekatan etik, peneliti bermaksud menelaah kebenaran ataupun justifikasi ilmiah dari partisipasi Masyarakat yang terjadi dengan disiplin ilmu kesehatan masyarakat.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan pendekatan diskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan April 2022.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian yang telah ditentukan memiliki peranan dalam proses Strategi . Adapun subjek penelitian adalah sebagai berikut: Informan kunci dalam penelitian ini yaitu kepala dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada dalam wilayah kerja dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan memenuhi kriteria serta pengambilan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling* dimana informan diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti serta jumlah informan yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Adapun kriteria informan penelitian yaitu : bersedia dijadikan sebagai informan, dan ibu-ibu yang telah melakukan KB. Serta, informan pendukung dalam penelitian ini yaitu kepala bidang Pengendalian dan Kasubag perencanaan Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Instrumen, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti melakukan validasi, terkait persiapan peneliti untuk terjun ke lapangan. Validasi instrumen penelitian meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai obyek penelitian. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah alat rekam, alat tulis dan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolok ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga Partisipasi peneliti secara langsung dan aktif dengan informan kunci dan pendukung dan sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: pengamatan Langsung atau observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data meliputi *data reduction, data display, dan conclusion drowing/ verification.*

HASIL

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dapat dilihat dari potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sehingga pertumbuhan penduduk kota Makassar dapat dikendalikan. Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan data yang diperoleh, diketahui bahwa kebijakan yang diambil adalah dengan penerapan program Keluarga Berencana (Keluarga Berencana) selain penerapan program keluarga berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana juga memuat strategi lain untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di kota Makassar. Salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi apakah mereka berhasil atau tidak yaitu dengan menilai hasil kerja mereka dalam menjalankan tugas yang mereka miliki tidak terkecuali Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Makassar.

Pemerintah memiliki tugas yang sangat berat dalam mengatasi pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah membentuk suatu badan yang ditugaskan untuk mengatasi hal tersebut yaitu BK Keluarga Berencana dan sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2010, dalam melaksanakan arah kebijakan Nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga, pemerintah telah menetapkan strategi di mana keluarga Berencana sebagai badan yang ditunjuk untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hal pertumbuhan penduduk dalam Rekarnas Tahun 2011-2015 telah menetapkan kebijaknnya yaitu: menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan Keluarga Berencana , meneggerakan dan memberdayakan para pemangku kepentingan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

(*stakeholders*), mitra kerja serta masyarakat, menata kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, pegawai dan tenaga penyuluh, serta meningkatkan pembiayaan.

Sejalan dengan kebijakan nasional masing-masing daerah juga memiliki kebijakan tersendiri, dimana kebijakan tersebut mengacu kepada kebijakan Pasangan Usia Subur at. Untuk kota Makassar ada DPPKB . Organisasi pemerintah ini merupakan mitra berkeluarga Berencana N dalam hal mengendalikan pertumbuhan penduduk di kota Makassar. Kebijakan kependudukan yang utama saat ini adalah kebijakan keluarga berencana, maka DPPKB sebagai lembaga pemerintah yang menangani masalah keluarga berencana di daerah dalam menyusun program kerja di daerah, dalam hal ini kota Makassar harus berdasar kepada perpaduan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Makassar merupakan salah satu organisasi pemerintah yang tujuan dan tupoksinya adalah menekan laju pertumbuhan penduduk di kota Makassar.

Fokus Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dari hasil wawancara dalam strategi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Makassar.

Perumusan Kebijakan Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Makassar

Perumusan merupakan bagian dan proses dalam menyusun langkah-langkah yang akan datang agar bisa membangun visi dan misinya dari perumusan tersebut dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan agar tercapainya sesuatu yang terbaik. Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan Ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah betugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dan Renja akan digunakan dalam 1 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana IA bahwa:

"Mengenai perumusan kebijakan itu merupakan tufoksi kita di dinas untuk merumuskan kebijakan yang akan dilakukan kedepannya sebagai pedoman juga bagi kita dalam pelaksanaan strategi di bagian pengendalian penduduk dan keluarga berencana". (Wawancara IA, 7 April 2022).

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa untuk perumusan strategi itu merupakan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana berdasarkan peraturan walikota Makassar tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi kedepannya.

Hal ini diperkuat oleh kasubag perencanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana AK berikut ini :

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

"Untuk perumusan strategi kita ada namanya rapat pembahasan di situkita merumuskan RENSTRA (Rencana Strategis), RENJA (rencana kerja) nah distumi kita bahas semua itu".(Wawancara AK, 7 April 2022)

Berdasarkan wawancara di atas untuk perumusan strategi oleh DPPKB memiliki forum untuk rapat pembahasan yang didalamnya untuk merumuskan rencana strategis (RENSTRA), dan rencana kerja (RENJA). Penyusunan rencana kerja Dinas pemgendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki pedoman atau acuan yang jelas mengenai tahapan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Makassar. Renja dari rencana-rencana usulan dari bawah (*botton up*) berupa musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan juga dari atas (*top down*) regulasi-regulasi dari Pasangan Usia Subur Provinsi, maupun Kota.

Penyusunan Renja awal disusun sebelum dilakukan penyempurnaan menjadi dokumen Renja yang devinitive, selanjutnya Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan Renja ada dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan: a). tahap perumusan rancangan Renja, b). tahap penyajian rancangan Renja.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana agar aparatur Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki pedoman yang jelas tentang tahapan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Makassar.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Makassar adalah sebagai berikut: Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya dan yang akan terjadi pada tahun yang akan mendatang; Menjamin terjadinya koordinasi,integrasi,sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah; Menjamin terjadinyapemamfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan; Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa pembahasan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

Rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Makassar merupakan perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan dan rencana strategis. Renja juga merupakan sebagai alat ukur untuk menilai tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan.

Adapun capaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana atas rencana kerja (RENJA) yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut : Program pelayanan Keluarga Berencana, program ini terdiri dari 15 kegiatan, terdiri dari 3 target kinerja cakupan persentase peserta Keluarga Berencana aktif, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin berkeluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmet Need), Keluarga PraSejahtera dan Sejahtera (KS); Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Program ini terdiri dari 1 kegiatan indikator kinerja program diukur melalui jumlah remaja yang telah memperoleh informasi tentang kesehatan remaja. Program ini dapat dicapai dengan bertambahnya jumlah kelompok PIK R baik jalur pendidikan maupun jalur masyarakat yang terbentuk sebanyak 190 kelompok kelompok remaja. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan Keluarga Berencana , Program ini terdiri dari 2 kegiatan indikator kinerja program diukur melalui presentase peran serta masyarakat dalam progam keluarga berencana memiliki 2 target kinerja yaitu; 1). Persentase Keluarga Berencana baru, 2). Persentase Keluarga Berencana aktif. Untuk capaian peserta Keluarga Berencana baru tidak tercapai. Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, Program ini terdiri dari 7 kegiatan, indikator kinerja program merupakan cakupan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

kapasitas dan kualitas pengasuhan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja dan peningkatan kualitas lansia melalui temu kader dan pengembangan.

Pelaksanaan Program Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Makassar

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan hal penting yang wajib dilakukan oleh suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta karena sosialisasi yang menjadi penentu keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melihat keberhasilan dari program keluarga berencana maka Dinas DPPKB melakukan penyuluhan, dan sosialisasi sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya Keluarga Berencana dan merencanakan khususnya yang sudah menikah.
Sesui dengan wawancara oleh informan YU berikut:
"Kita melakukan sosialisasi mengenai program keluarga berencana ini supaya biasa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program dengan tujuan meningkatkan akseptor (pengguna keluarga berencana) baru melalui sosialisasi yang kita lakukan". (wawancara, YU 9 April 2022)

Sosialisasi dilakukan oleh DPPKB bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya program keluarga berencana dan meningkatkan pengguna Keluarga Berencana baru.
Lebih lanjut Sesuai dengan wawancara oleh informan YU berikut :
"Untuk sosialisasinya kita itu lakukan berbagai cara seperti kelompok dan individu, kalau kelompok itu misalnya kita mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi dan jika individu itu kita lakukan dengan mendatangi rumah-rumahnya warga satu persatu (door to door) dan kemudian kita berikan mi pemahaman mengenai Keluarga Berencana". (wawancara YU 25 April 2022).

Berdasarkan wawancara maka diketahui motode yang dilakukan untuk sosialisasi itu dengan cara kelompok atau individu, kelompok seperti mereka diberikan fasilitas tempat dan dibuatkan forum kemudian mereka diundang dan kemudian disitu kita memberikan materi atau edukasi mengenai program keluarga berencana ini, lalu individu itu seperti dating secara langsung kepada masyarakat
Hal ini senada dengan wawancara informan R :
"kita sadar jika memang keluarga berencana ini penting yah saling membantu saja pemerintah memberikan kita pelayanan buat kita dan kita juga ikut, tujuannya kan untuk membatasi anak yah kita dukung dan ikut berpartisipasi apalagi kan kita ini tinggal dikota tidak punya lahan yang luas kalau anak banyak kan kita juga tidak tau nanti mereka mau tinggal dimana". (Wawancara R 11 April 2022)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Masyarakat sadar mengenai pentingnya berkeluarga Berencana sehingga mereka memanfaatkan pelayanan Keluarga Berencana untuk berpartisipasi karena masyarakat paham jika memiliki banyak anak di lahan terbatas maka nantinya tidak akan ada tempat untuk anak-anaknya kelak.
Sesui dengan wawancara oleh informan MR berikut :
"Untuk sosialisasi itu kita dibantu oleh plkeluarga berencana mereka memberikankomunikasi, informasi dan edukasi (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat bertapa pentinggnya ini keluarga berencana dalam membatasi jumlah penduduk dengan tentunya membatasi jumlah anak, diberikan juga pemahaman mengenai bahayanya pernikahan dini".(Wawancara, MR 25 April 2022).

Sosialisasi program keluarga berencana ini bukan hanya DPPKB yang yang melakukan tapi dibantu oleh plkeluarga berencana (petugas lapangan keluarga berencana) dilakukan dengan memberikankomunikasi, informasi dan edukasi (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai pentingnya program Keluarga Berencana sebagai upaya membatasi jumlah penduduk dan jumlah anak, dan masyarakat juga diberi pemahaman agar tidak terjadinya penikahan dibawah umur.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Sesuai dengan wawancara oleh informan MA berikut :

"yang kita lakukan itu, mereka diajak ikut dalam program Keluarga Berencana lagi pula sebenarnya mereka sudah tidak asing lagi sama ini apa-apa (keluarga berencana) karena ini sudah ada mi dri lama hanya saja yah kita dari dinas dan upt selalu dan tetap untuk mengajak mereka di kasikan edukasi bahwa penting sekali untuk berKeluarga berencana ".(Wawancara MA 25 April 2022)

Hal yang dilakukan saat sosialisai itu, mengajak masyarakat untuk program keluarga berencana memberikan mereka pemahaman lebih mendalam mengenai program Keluarga berencana . Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui apa itu Keluarga Berencana hanya saja yang mereka ketahui masih dasar-dasarnya belum secara mendalam, maka dari itu DPPKB dan UPT yang terkait selalu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat mengenai pentingnya untuk berkeluarga berencana .

Hal ini sesuai yang dikatakan wawancara informan S bahwa:

"Arti keluarga berencana menurutku itu adalah cara untuk mengatur angka kelahiran dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk supaya tidak padat penduduk". (Wawancara, S 11 April 2022)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa arti Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur angka kelahiran anak dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi kepadatan penduduk disuatu daerah.

Hal ini juga disampaikan oleh wawancara informan N

"Saya ikut keluarga berencana dek, karena saya sadar juga pendidikan itu sekarang mahal belum lagi kita ini kan yah bisa dibilang pas-pas an hidupnya, terus kalau anak juga banyak terus jarak kelahirannya tidak terkendali kan jadi susah juga dek kita harus membiayai banyak ana k itu susah sekali dek makanya kami sepakat untuk berKeluarga berencana setidaknya kalau 2 ji anakta lebih bisa ki mengatur keuangan dan waktu untuk mengurus anak-anak". (Wawancara N 11 April 2022)

Berdasarkan wawancara yang disampaikan di atas alasan Pasangan Usia Subur (PUS) berkeluarga berencana karena pendidikan saat ini mahal jika pasangan usia subur memiliki anak yang banyak serta jarak kelahirannya tidak terkendali maka akan sulit untuk memperbaiki taraf perekonomian keluarga sehingga mereka memutuskan untuk membatasi jumlah anaknya dengan berkeluarga berencana. Ini dapat dilihat dari Pasangan Usia Subur pada tabel berikut ini :

Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah usaha memengaruhi pola perkembangan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan.

Berikut ini kutipan wawancara informan MR kepala bidang pengendalian penduduk mengenai pelaksanaan strategi:

"Mengenai strategi dinas pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana di kota Makassar itu di dinas yang dibagi menjadi 4 (empat) bidang yang tidak terpisahkan dan saling terkai satu sama lain. kalau bidang pengendalian penduduk itu mengenai pengendalian laju pertumbuhan penduduknya, kalau masalah pelayanan itu di bidang Keluarga Berencana , berbicara masalah advokasinya ada di bidang penggerakan". (wawancara MR 4 April 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada 4 (empat) bidang yang saling terkait satu sama lain, yakni bidang keluarga berencana bidang penyuluhan penggerak, bidang pengendalian penduduk dan bidang ketahanan dan kesehjateraan keluarga yang masing-masing memiliki tupoksi dalam menjalankan strategi pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Hal ini didukung oleh wawancara informan A yang menyatakan bahwa:

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

"Iya untuk strategi semua bidang ini masing-masing memiliki program dan masing-masing memiliki kegiatan. Strategikan di dinas pengendalian penduduk ini ada beberapa program untuk menurunkan angka kelahiran, untuk meningkatkan peserta Keluarga Berencana ". (wawancara A, 4 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) bidang yang saling terkait ini memiliki program kerja serta kegiatan tersendiri yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran), dan meningkatkan peserta Keluarga Berencana .

Hal ini sejalan dengan wawancara informan AK yang mengatakan bahwa:

"Di bidang pengendalian penduduk itu sendiri berbicara mengenai angka kelahiran , peserta Keluarga Berencana , dan capaiannya dibidang pengendalian penduduk itu adalah evaluasi dari semua bidang. Yang bergerak itu dibidang penggerakan karena disitukomunikasi, informasi dan edukasi nya, advokasinya dan penggerakannya. Kemudian yang melaksanakan penggerakannya yaitu bidang Keluarga Berencana ". (wawancara AK 7 April 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa, di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki pembagian program kerja berdasarkan bidang masing masing. Bidang pengendalian pendududukeluarga berencana erfokus pada angka seperti angka kelahiran , peserta Keluarga Berencana dan capaiannya merupakan hasil evaluasi dari semua bidang. Di bidang penyuluhan dan penggerakan bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bagian penyuluhan dan pergerakan karena Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dan advokasinya. Bidang Keluarga Berencana bertugas untuk pelayanan pelaksanaan keluarga berencana termasuk pengendalian dan pendistribudian alkon, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga Berencana . Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga bertugas sebagai pemberdayaan keluarga sejahtera, pembiaan ketahanan balita, anak, remaja dan lansia.

Lebih lanjut wawancara oleh informan AK sebagai berikut:

"Jika berbicara mengenai strateginya itu ada 3 program utama dalam pengendalian penduduk yaitu program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan program peningkatan pemberdayaan keluarga itu strateginya". (wawancara AK 7 April 2022)

Sesui dengan wawancara diatas bahwa strategi dalam pelakasanaan pengendalian pertumbuhan penduduk memiliki 3 program utama yaitu program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan program peningkatan pemberdayaan keluarga tentu itu dilaksanakan oleh sesuai bidang yang terkait.

Hal ini selaras dengan wawancara oleh informan YU sebagai berikut:

"Misalnya program pengendalian penduduk ada beberapa kegiatan didalamnnya pertama pengadaan dan pemamfaatan grand desain, koordinasi dengan sekolah siaga kependudukan, sarahsehan, pengolahan data dan informasi dan laju pertumbuhan penduduk. Kalau program keluarga berencana yaitu pelayanan dikampung Keluarga Berencana pengindistribusian alat kontrasepsi dan pelayanan jaminan kesehatan". (wawancara YU 9 April 2022)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa program utama seperti program pengendalian penduduk memiliki beberapa kegiatan didalamnya yaitu pengadaan dan pemamfaatan grand desain, koordinasi dengan sekolah siaga kependudukan sarasehan, pengolahan data dan informasi, pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan program keluarga berencana memiliki kegiatan yaitu pelayanan kampung Keluarga Berencana , pengindistribusian alat kontrasepsi, dan pelayanan jamianan kesehatan.

Hal ini sejalan dengan wawancara oleh informan MA sebagai berikut:

"Itulah strategi pelaksanaan pengendalian penduduk melaksanakan pelayanan Keluarga berencana , pembinaan keluarga, melaksanakankomunikasi, informasi dan edukasi serta elaksanakan advokasi, kita melaksanakan evaluasi dan monitoring". (wawancara MA 25 April 2022)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi dalam pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk itu adalah pelaksanaan pelayanan Keluarga berencana , pembinaan keluarga, melaksanakankomunikasi, informasi dan edukasi , melaksanakan advokasi, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring terkait dengan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Makassar.

Monitoring dan Evaluasi Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Makassar

Monitoring dan evaluasi merupakan pengawasan dan penilaian atau dapat diartikan suatu proses yang dapat menentukan hasil dari suatu hal apakah berhasil atau tidak. Untuk menilai strategi pelaksanaan itu berhasil atau tidak maka dapat dinilai dari ketercapaian tujuan dan sasaran program tersebut. Mengetahui sejauh mana keseluruhan upaya yang dilaksanakan berdampak terhadap kemajuan program keluarga berencana , termasuk pelayanan keluarga berencana keterjangkaun pelayanan dan kualitas pelayanan keluarga berencana berdasarkan kebijakan yang berlaku.

Hal ini disampaikan oleh wawancara informan IA mengenai monitoring dan evaluasi program Keluarga Berencana :

"Kita melakukan evaluasi dan monitoring untuk program Keluarga Berencana ini sebagai tolak ukur untuk menilai apakah program Keluarga berencana ini berhasil ini juga merupakan termasuk di dalam strategi pelaksanaan" (Wawancara, IA 7 April 2022)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa DPPKB melakukan evaluasi dan monitoring dari setiap program yang di lakukan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan termasuk program tersebut begitu pula program keluarga berencana dilakukan evaluasi dan monitoring.

Hasil wawancara dengan informan MR mengatakan bahwa :

"*Mengenai partisipasi masyarakat terhadap program Keluarga Berencana berdasarkan data yaitu rata-rata 68% atrinya tingkat partisipasi masyarakat terhadap keluarga berencana itu cukup tinggi dari sekian banyak pasangan usia subur itu rata-rata 68% yang menggunakan alat kontarasepsi tapi kurang lebih 32% yang belum menggunakan alat kontrasepsi dengan berbagai alasan seperti pengantin baru, baru satu anaknya mau anak ke 2, sementara hamil, ingin berkeluarga berencana tapi tidak tau dimana dapatkan alat kontrasepsi atau tidak terlayani". (wawancara, MR 9 April 2022)*

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa partisipasi masyarakat terhadap program Keluarga Berencana itu cukup tinggi yaitu rata-rata 68%, hanya saja masih ada kurang lebih 32% yang belum menggunakan alat kontrasepsi dengan berbagai alasan seperti Pasangan Usia Subur tersebut merupakan pengantin baru, ingin memiliki anak ke 2, sementara hamil, serta ingin berkeluarga berencana tapi tdk cocok dengan alat kontrasepsi yang ingin digunakan. Ini dapat dilihat dari data peserta aktif berKB berikut ini :

Hal ini senada dengan tanggapan oleh wawancara informan MA :

"Kalau ada yang tidak mau memang berkeluarga berencana itu kita tidak akan paksa atau semacamnya, cukup kita mengingatkan dan memberi pemahaman kepada mereka apa sebenarnya ini keluarga berencana dan betapa pentingnya ini keluarga berencana bagi kita dengan harapan mereka bisa sadar kalau memang penting ini keluarga berencana dan kedepannya mereka juga bisa ber keluarga berencana "(wawancara, MA 25 April 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dan diketahui bahwa memang masih ada Pasangan Usia Subur yang tidak mau berkeluarga berencana tapi dari DPPKB tidak akan memaksa Pasangan usia Subur tersebut untuk berkeluarga Berencana atau memberikan sanksi kepada mereka karena itu hak mereka

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

hanya saja dinas tetap meyikapi hal tersebut seperti memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pentingnya untuk mereka berkeluarga berencana dengan harapan agar mereka sadar dan kemudian mau untuk berkeluarga berencana.

DISCUSSION

Hasil penelitian di atas terhadap Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program Keluarga berencana (keluarga berencana) di kota Makassar dapat dilihat seperti berikut ini :

Perumusan Kebijakan Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Makassar

Kebijakan publik suatu keputusan yang diambil untuk menghadapi situasi atau permasalahan, mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana untuk mencapainya. Kebijakan publik diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bemegara. Segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan sebaiknya bertumpu pada keinginan, harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting terhadap proses pembuatan kebijakan bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak masyarakat. Pada dasamya, kebijakan publik adalah untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi aktor kebijakan. Saat ini, produk kebijakan publik di Indonesia masih memiliki wajah yang memprihatinkan yang ditandai antara lain adanya tumpang tindih kebijakan, ketidakjelasan urgensi keberadaan kebijakan publik, prosedur yang tidak tepat dalam pembuatan kebijakan publik, serta minimnya naskah akademik sebagai dasar pembuatan kebijakan. Permasalahan tersebut akan semakin mengemuka jika kita kaitkan dengan kewenangan. ldealnya kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada. setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting terutama untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat sebagai dampak dari kebijakan. Namun dalam prakteknya menunjukkan berbagai kebijakan publik yang telah ditetapkan seringkali menuai kritik dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan cenderung kontra produktif. Kenyataan ini dikarenakan dalam proses kebijakan keterlibatan masyarakat tidak dilaksanakan secara utuh dan mekanismenya cenderung formalitas sehingga akomodasi stakeholders belum mewakili kepentingan masyarakat pada umumnya. Selama ini masyarakat biasanya hanya bisa menerima kebijakan pemerintah tanpa mengetahui ·alasannya. Suara mereka seolah-olah tidak didengar dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, masyarakat selalu menjadi objek dari sebuah kebijakan publik yang seringkali kurang berpihak pada kepentingan mereka. Permasalahan tersebut muncul karena masyarakat tidak mempunyai akses yang cukup untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menyuarakan aspirasi mereka ketika formulasi sebuah kebijakan dibuat.

Perumusan kebijakan salah satu langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implemantasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak merakyat. Membuat

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa Peraturan/Peraturan Daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan/ Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan status *quo* pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan.

Perumusan kebijakan pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Rencana kebijakan memang diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis mengenai cara, perilaku, biaya, strategi implementasi, dan konsekuensi dari kebijakan, baik atau buruk. Namun, para ahli dan analis teknis tidak bertanggung jawab langsung kepada publik. Keputusan untuk melakukan trade-off, prioritas nilai, dan beban efek keseluruhan pada akhirnya tetap harus diambil oleh para pengambil keputusan.Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilihat dari dimensi perumusan kebijakan yaitu berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat perumusan sudah dilakukan setiap tahunnya dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian di atas perumusan kebijakan yang di Lakukan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sudah cukup efektif, ini dapat diliat dari telah adanya kebijakan tentang program Keluarga Berencana (KB) yang di telah di tetapkan oleh pemerintah kota Makassar.

Pelaksanaan Program Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Makassar

Sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait teori strategi dilihat dari dimensi pelaksanaan sosialisasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sudah cukup efektif jika dilihat dari hasil jumlah peserta ikut keluarga berencana aktif, namun Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap berupaya untuk meningkatkan capainnya agar Masyarakat tetap konsisten dan mengikuti program Keluarga berencana ini.

Komunikasi yang Efektif untuk meningkatkan Program ini memang dengan cara Sosialisasi Langsung ke masyarakatnya tentang penting dan bermamfaat melakukan KB dengan tidak memaksakan tetapi memberikan pemahaman yang lebih lagi,dimana mamfaat ber KB selain Mensejahterakan Keluarga, Hidup Bahagia dan keluarga tercukupi juga meminimalisir komplikasi yang bisa terjadi pada ibu yang berkali kali melakukan persalinan. Sosialisasi sangat diperlukan untuk memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat. Sosialisasi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya dukungan dari orang-orang tersebut, juga menjalin kemitraan dari berbagai lembaga, baik pemerintah dan non pemerintah. Selain sosialisasi, pelayanan KB pun harus tersedia agar adanya persamaan antara apa yang diutarakan dengan tindakan yang dilakukan. Tidak ada badan yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan hubungan dengan badan-badan lain. Perkembangan masyarakat modern sudah demikian sifatnya, sehingga tidak ada kemungkinan bagi seorang individu atau suatu badan untuk menyendiri.

Sosialisasi program KB dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi antar pribadi dan juga komunikasi kelompok seperti yang dilakukan oleh DPPKB Dimana komunikasi tersebut dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku manusia berhubung prosesnya yang dialogis. Karena keampuhan dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku dipergunakan untuk melancarkan komunikasi secara psikologis yang sifatnya halus, luwes berupa ajakan, bujukan dan rayuan. Efektivitas komunikasi dalam kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan dilihat dari sejauh

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

mana kegiatan tersebut mampu mengubah sikap pesertanya. Sikap dalam hal ini berarti konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya. Pentingnya komunikasi terletak pada pemberian, penerangan, membujuk, membangun semangat dan pemberian motivasi pada si penerima komunikasi sehingga dapat menimbulkan kesan positif.

Program sosialisasi merupakan program rutin yang dilakukan DP2KB untuk memberikan informasi, terutama bagi masyarakat yang masih kurang mengerti dan paham tentang pengetahuan dan pentingnya program KB. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat membentuk sikap masyarakat tidak hanya menjadi tahu, mengerti tapi dapat melakukan suatu tindakan, karena proses penyampaian informasi atau transmisi pesan mempunyai pengaruh dan efek dalam interaksi sosial, sehingga membangun opini publik dan mampu membentuk sikap individual atau kelompok.

Kesuksesan sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi biasanya dapat dilihat dari data pengguna KB itu sendiri, apabila setelah dilakukan sosialisasi pengguna KB meningkat, itu artinya sosialisasi yang dilakukan berhasil, namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka sosialisasi belum dapat dikatakan berhasil.

Sosialisai proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Sosialisasi sebenarnya merupakan bidang yang mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari sebuah masyarakat. Sosialisasi membahas interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Atas dasar tersebut, sosialisasi bagian mata rantai terpenting di antara sistem sosial yang ada. Sosialisasi suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat.

Sosialisasi suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar dunia luar. Hal itu bertujuan agar ia dapat ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Pengendalian Penduduk

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Kenaikan tersebut tentu saja akan membawa dampak bagi kependudukan, dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas umum

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yaitu dengan program komunikasi pembangunan yang dikenal dengan program KB.

Keluarga berencana (KB) suatu program pemerintah yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana (KB) upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB juga salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB meliputi penyediaan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi keluarga untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak. Penyerasian kebijakan kependudukan proses perlaksanaan perkembangan pertumbuhan dan tujuan yang mengarahkan jumlah peningkatan lahiran agar dapat meningkatkan keluarga yang sejahtera, dan dimana keikut sertaan kemasyarakatan agar dapat berkembang secara menyeluruh dalam pengendalian suatu program Keluarga Berencana dan sektor-sektor pertumbuhan lainnya. Pemerintah kota Makassar terus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan, melakukan program Keluarga Berencana yang dinaungi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konsisten yang menjadi suatu kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Program Keluarga Berencana yang telah dilakukan merupakan bukti implementasi akan adanya upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu masalah pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian kita bersama karena kedepan persoalan kependudukan akan semakin kompleks, persoalan kependudukan di Kota Makassar kedepan tidak saja menyangkut persoalan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang masih tetap memerlukan penangan namun juga menyangkut persoalan jumlah perubahan dinamika struktur rumus dan distribusi penduduk.

Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan peranan nya agar lebih baik serta masyarakat harus lebih peduli dan ikut berpartisipasi dalam program-program yang di buat oleh pemerintah demi mengatur pengendalian pertumbuhan penduduk, yang dapat di lakukan lebih baik lagi adalah dalam hal meningkatkan tata kelola pemerintahan dan partisipasi yang berorientasi pada pelayanan publik, selain itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan peranan nya agar lebih baik serta masyarakat harus lebih peduli dan ikut berpartisipasi dalam program-program yang di buat oleh pemerintah demi mengatur pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pengendalian salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian pertumbuhan penduduk diartikan sebagai kegiatan dalam membatasi pertumbuhan penduduk, yang pada umumnyadengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran anak demi mencapau tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dikarenakan terjadinya suatu pertumbuhan yang sangat tinggi disuatu Negara. Itulah yang menjadi landasan pemerintah melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Banyak hal menyebabkan terjadinya ledakan penduduk di suatu daerah yakni karena tingginya angka kelahiran di sebuah negara serta kurang berhasilnya program KB yang di usung oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas pelaksanaan program pengendalian dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sudah cukup efektif jika dilihat dari hasil jumlah peserta ikut keluarga berencana aktif, namun Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap berupaya untuk meningkatkan capainnya agar dapat mengurangi kepadatan penduduk di Kota Makassar.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Evaluasi dan Monitoring Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Makassar

Monitoring dan Evaluasi dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Karena kegiatan ini menggunakan metode pelatihan (workshop) maka bahan ini hanya sebagai pengayaan yang dilengkapi informasi pokok mencakup aspek-aspek penting dari Monitoring dan Evaluasi (MONEV), seperti pengertian, tujuan, fungsi, manfaat hingga proses pembuatannya.

Monitoring dan evaluasi memiliki tugas yang sama yaitu memantau atau menilai jalannya suatu program. Monitoring lebih digunakan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan yang dijumpai agar dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian, tujuan program bisa dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. dangkan evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program. Dimana, evaluasi ditujukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut, dan juga dapat mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan dapat terjadi. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa mendatang.

Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Mengenai evaluasi dan monitoring partisipasi Masyarakat dalam program keluarga berencana ini cukup tinggi iika dilihat berdasarkan data maka rata-rata 68% yang telah Berkeluarga berencana sisanya sekitar 32% yang belum berkeluarga berencana karena berbagai alasan seperti sedang hamil, ingin memiliki anak lagi, tidak terlayani misalnya tidak cocok dengan alat konstrasepsi yang diinginakan, pengantin baru, sudah manupause, dan memang tidak ingin berkeluarga berencana dengan alasan tertentu.

KESIMPULAN

Beberap kesimpulan dari penelitian ini yaitu; 1). Perumusan Kebijakan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengenai Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program Keluarga Berencana di Kota Makassar telah dilaksanakan dalam bentuk forum internal pembahasan Renja dan Renstra yang membahas mengenai program-program yang akan di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam hal perumusan untuk mengatasi pengendalian pertumbuhan penduduk ialah melalui beberapa program dan kegiatan yaitu program pelayanan keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja (KRR), program pembinaan peram serta masyarakat dalam pelayanan KB, program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. 2). Pelaksanaan Program oleh Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada program pelayanan keluarga berencana berjalan cukup baik hanya saja ada beberapa hambatan apalagi pada saat ini di masa p*andemic* adanya pembatasan seperti pelayanan yang tidak bisa dilakukan melebihi orang dalam 1 hari, Sosialisai program KB dinilai cukup berhasil karena berdasarkan data Akseptor saat ini mencapai 68% yang telah ber KB, adapun sekitar 32 % Pasangan Usia Subur lainnya yang belum berKB karena sedang hamil. 3). Evaluasi dan Monitoring dalam partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana cukup tinggi dikarenakan dapat dil ihat data peserta aktif.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai strategi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di kota Makassar disampaikan saran-saran sebagai berikut: Bagi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk membuat program kebijakan diluar Renstra dan Renja sebagai program tambahan dalam mengatasi pertumbuhan penduduk di kota Makassar. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pelayanan KB sehingga masyarakat dapat paham lebih mendalam mengenai pentingnya KB.

Declaration of Conflicting Interest
The author (s) declared no potential conflict of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article

DAFTAR PUSTAKA

J. Salusu . 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Grasindo.

Kurnia, Adi. 2020. "Telaah Proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam Perspektif Manajemen Strategis (Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya)." 7: 268–76.

Mulyadi. 2014. *Akuntansi Biaya*. 5th ed. Yogyakarta: Universitas Gadjah mada.

Nuraeni, Ina, M Rijal Amirulloh, and Dine Meigawati. 2021. "Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dalam Kesadaran Masyarakat Mengenai Program Keluarga Berencana Di Kota Sukabumi." 5: 277–85.

Purnomo, Eko. 2017. "Department of Communication StudiesFaculty of Social and Political Sciences University of Riau." 4(1): 1–15.

Riskiyono, Joko. 2017. *Pe-Ngaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang Undang*. Depok: Nadi Pustaka.

Rivai, Abdul, and Darsono Prawinegoro. 2015. *Manajemen Strategis*. jakarta: mitra wacana media.

Rodliyah. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rohman, Ainur. 2012. *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan Dan Demokrasi*. jakarta: Program Sekolah Demokrasi.

Subarsono, Agustinus. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Susanto, Tulus, Heru Ribawanto, and Abdul Wachid. 2015. "STRATEGI Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar) Tulus Susanto, Heru Ribawanto, Abdul Wachid." 3(12): 1986–91.

Thompson, Arthur, Margaret Peteraf, and John A Gamble. 2014. *Crafting and Executing Stategy 19 Th*

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Edition. Mc Graw Hill Education.

Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktik*. Yogyakarta: Rajawali.

Widodo, Eko, and Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan*. jakarta: PT Bumi Aksara.

Yanti, Sukma. 2021. "Strategi Pemerintah Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (Studi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Di Provinsi Jambi)."

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah

www.bps.go.id, *Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971- 1980- 1990- 1995- 2000 dan 2010*

Widjadjadi, 2016. Hadiah Rp1,5 Juta Untuk Peserta KB Pria. https://mediaindonesia.com/read/detail/79083-hadiah-rp1-5-juta-untuk peserta-kbpria, https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/35/1/jumlahpenduduk.html

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license